

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Salah satu kriteria penghidupan yang layak adalah tersedianya kebutuhan air minum yang cukup bagi setiap warga negara. Namun, pemenuhan kebutuhan akan air minum menjadi hal yang sulit dilakukan di beberapa negara akibat tidak proporsionalnya kebutuhan air minum dibandingkan dengan persediaan yang dimiliki.

Permasalahan terkait penyediaan air minum sudah ada sejak krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. Tingkat kerusakan jaringan pengairan yang tinggi menyebabkan proses penyediaan air minum menjadi terhambat. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia harus menyediakan air minum yang cukup bagi masyarakat sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019

Dalam mengatasi permasalahan keterbatasan ketersediaan air minum tersebut, maka pada dasarnya diperlukan penyediaan infrastruktur sebagai komponen utama tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah mengimplementasikan solusi tersebut dengan pembangunan infrastruktur proyek air minum menjadi salah satu proyek strategis nasional yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 mengenai Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Mewujudkan target tersebut, maka dibentuklah pembangunan penyediaan air minum dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). SPAM merupakan bentuk pengelolaan pemanfaatan sumber daya air dan sanitasi sebagai bentuk konservasi terhadap sumber daya air yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan/atau daerah.

SPAM didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan ketersediaan air minum yang layak guna mendapatkan kehidupan yang sehat dan bersih. Proyek SPAM dapat dilakukan dengan berbagai skema, salah satunya adalah skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). KPBU dapat didefinisikan sebagai kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah dan badan usaha dalam rangka penyediaan infrastruktur yang bertujuan untuk kepentingan umum dengan merujuk pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.

Skema KPBU merupakan sebuah alternatif pembiayaan infrastruktur sebagai bentuk peralihan dari sistem konvensional. Pemilihan skema KPBU merupakan sebuah solusi dari masalah keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah seiring dengan kebutuhan penyediaan infrastruktur yang semakin meningkat.

Salah satu proyek penyediaan air minum yang menggunakan skema KPBU adalah SPAM Semarang Barat. Pelaksanaan proyek ini juga termasuk dalam rencana sebagai proyek strategis nasional. SPAM Semarang Barat didirikan untuk mengatasi permasalahan krisis air bersih dan penurunan permukaan tanah yang terjadi akibat penggunaan air tanah di Kota Semarang. Selain itu, proyek SPAM Semarang Barat juga bertujuan untuk memenuhi ketersediaan air minum yang layak untuk 31 kelurahan pada tiga kecamatan dengan target estimasi 60.000 keluarga yang belum teraliri SPAM di wilayah Semarang Barat, Ngaliyan, dan Tugu.

SPAM Semarang Barat dapat menampung kapasitas 1.000 liter per detik yang memakan biaya sejumlah Rp 1,9 triliun, dana tersebut berasal dari dana investasi Rp 480 miliar, dana Pemerintah Pusat sebesar Rp 400 miliar, dan sisanya didanai menggunakan dana Pemerintah Kota Semarang dan PDAM Tirta Moedal.

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini akan dituangkan dalam karya tulis tugas akhir yang lebih berfokus kepada tata cara dan porsi pembiayaan proyek melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha pada proyek SPAM Semarang Barat, Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam karya tulis tugas akhir yang berjudul “TINJAUAN ATAS PENERAPAN SKEMA KPBU PADA PROYEK SPAM SEMARANG BARAT”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diambil penulis dalam menyusun KTTA ini adalah:

1. Bagaimana tata cara pendanaan pembiayaan pada proyek SPAM Semarang Barat dengan skema KPBU?
2. Apa saja kendala dalam implementasi skema KPBU pada proyek SPAM Semarang Barat?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai pada penulisan KTTA ini antara lain:

1. Mengetahui skema pendanaan dan skema pembiayaan yang dilakukan dalam penerapan skema KPBU pada proyek SPAM Semarang Barat
2. Mengetahui alur proses bisnis dalam penerapan skema KPBU pada proyek SPAM Semarang Barat
3. Mengetahui kendala yang terjadi selama berlangsungnya penerapan skema KPBU serta solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan pada Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini dibatasi pada salah satu proyek infrastruktur yang didanai dengan skema KPBU yakni SPAM Semarang Barat. Penulisan akan menjelaskan terkait skema pendanaan proyek SPAM Semarang Barat beserta proses bisnis yang dilakukan dalam proyek SPAM Semarang Barat.

Penulisan KTTA ini akan lebih berfokus pada pembiayaan (*financing*), bentuk kerja sama proyek, dan bentuk dukungan pemerintah. Selain itu, ruang lingkup penulisan ini juga akan membahas mengenai pendanaan (*funding*) berupa

porsi pembiayaan proyek KPBU SPAM Semarang Barat. Dalam pelaksanaan proses bisnis proyek ini serta kendala yang terjadi selama keberlangsungan proyek SPAM Semarang Barat.

1.5 Manfaat Penulisan

Dengan adanya penulisan karya tulis tugas akhir ini, diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

1. Manfaat Akademik

Hasil dari karya tulis tugas akhir ini dapat menjadi referensi baru mengenai proyek SPAM Semarang Barat melalui skema KPBU dan dapat memberikan pengetahuan serta mengetahui tingkat pemahaman penulis terhadap skema KPBU untuk membiayai proyek infrastruktur pemerintah.

2. Manfaat Praktik

Karya tulis ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas dalam proses KPBU dalam proses pembangunan infrastruktur pada proyek SPAM Semarang Barat.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Karya tulis tugas akhir ini terdiri dari empat bab dan tiap-tiap bab terdiri dari sub bab dan sub-sub bab dengan urutan pembahasan yang akan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum dari karya tulis tugas akhir. Bagian pendahuluan KTTA terdiri dari latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan. Pada bagian ini harapannya

diketahui alur berpikir penulis dalam memaparkan objek penelitian. Isi dari subbab KTTA tersebut adalah sama dengan proposal, serta bagian akhir dari pendahuluan adalah sistematika penulisan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan menerangkan mengenai teori dari sistem penyediaan air minum (SPAM), dan teori yang berhubungan dengan skema KPBU yang meliputi konsep dasar SPAM, konsep dasar KPBU, tahapan pelaksanaan KPBU dan bentuk dukungan pemerintah.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis akan menjelaskan metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan karya tulis tugas akhir. Metode pengumpulan data ini akan menjelaskan mengenai bagaimana penulis mengumpulkan data yang akan digunakan sebagai bahan analisis

Selanjutnya, penulis akan menyajikan gambaran umum dari pelaksanaan proyek KPBU SPAM Semarang Barat yang meliputi deskripsi proyek dan badan usaha pelaksana pada proyek. Kemudian pada bagian pembahasan akan dipaparkan tinjauan atas penerapan skema KPBU SPAM Semarang Barat yang meliputi beberapa sub-sub bab yaitu bentuk kerja sama proyek, porsi pembiayaan proyek, dukungan pemerintah, tahapan perencanaan proyek, tahapan penyiapan proyek, tahapan transaksi proyek serta tahapan pelaksanaan proyek.

BAB IV KESIMPULAN

Bab ini terdiri dari simpulan terhadap penjelasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai pada penulisan karya tulis tugas akhir serta saran yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk perbaikan di waktu yang akan datang.